KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

# Konsep dan Pedoman

## PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Tingkat Sekolah Dasar
dan
Sekolah Menengah Pertama

# TIM PENYUSUN **BUKU**

**Penasihat:** Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

**Pengarah:**
1. Didik Suhardi, Ph.D. , Sekretaris Jenderal
2. Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D., Dirjen Dikdasmen
3. Sumarna Surapranata, Ph.D., Dirjen Guru dan Tendik
4. Ir. Totok Suprayitno, Ph.D, Kepala Balitbang
5. Ir. Harris Iskandar, Ph.D, Dirjen PAUD dan Dikmas
6. Hilmar Farid, Ph.D., Direktur Jenderal Kebudayaan
7. Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum., Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
8. Daryanto, Ak., MIS., Gdip.Com, QIA, CA., Inspektur Jenderal
9. Prof. Suyanto, Ph.D., Universitas Negeri Yogyakarta
10. Dr. James Modouw, M.MT., Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Pusat dan Daerah
11. Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc., Ph.D., Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing
12. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H., Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi
13. R. Alpha Amirachman, M.Phil., Ph.D., Staf Khusus Menteri Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan
14. Prof. Ir. Nizam, M.Sc. DIC., Ph.D., Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
15. Dra. Poppy Dewi Puspitawati. M.A., Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
16. Dra. Garti Sri Utami, M.Ed., Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen
17. Dr. Sukiman, M.Pd., Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga
18. Dr. Biyanto, M.Ag., UIN Sunan Ampel
19. Dra. Arbayah Yusuf, M.A., UIN Sunan Ampel

**Tim PPK**
Ketua : Dr. Arie Budhiman, M.Si., Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Karakter
Sekretaris : Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A., Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
Koordinator SD : Drs. Wowon Widaryat, M.Si., Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
Koordinator SMP : Dr. Supriano, M.Ed., Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

**Tim Penyusun**
Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D., Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Prof. Dr. Djoko Saryono, Universitas Negeri Malang
Prof. Dr. Supriyono, Universitas Negeri Malang
Prof. Dr. Waras Kamdi, Universitas Negeri Malang
Prof. Dr. Sunaryo, Universitas Pendidikan Indonesia
Latipun, Ph.D., Universitas Muhammadiyah Malang
Dr. Tulus Winarsunu, Universitas Muhammadiyah Malang
Dra. Hj. Lise Chamisijatin, M.Pd., Universitas Muhammadiyah Malang
Doni Koesoema A., M.Ed., Tenaga Ahli Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)
Dr. Bambang Indriyanto, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Sri Hidayati, M.Si., Kepala Bidang Kurikulum, Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kurniawan, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)
Dr. Susanti Sufyadi, S.Pd., M.Si., Kepala Seksi Penilaian, Direktorat Pembinaan SD
Dra. Ninik Purwaning Setyorini, M.A., Kepala Seksi Pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMP
Erry Utomo, Ph.D., Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Odo Hadinata, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Elly Wismayanti, Direktorat Pembinaan SMP
Lanny Anggraini, S.Pd., M.A., Direktorat Pembinaan SD
Heri Puspito Diyah Setiyorini, Tim Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Karakter
Alsha Kania, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)
Tsalitsa Haura S., Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)

**Tim Pendukung**
Fransisca Nur'aini Krisna, S.Si., Apt. MPP., Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Sri Fajar Martono, S.Psi., Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Putri Pandora, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)
Dwiyani Widhiharsi Kusuma Putri, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)
Rizki Muhammad Ramdhan, Tim Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Karakter
Shaskia Shinta Rialny, Tim Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Karakter
Vitri Dwi Martini D., Tim Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Karakter
Rusprita Putri Utami, S.E., M.A., Kasubbag Tata Usaha, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)
Muhammad Sopian, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)
Marista Sinaga, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)

**Editor Bahasa** Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.

**Desain sampul dan tata letak** Zaitun Y.A. Kherid, M.Pd.

**Sekretariat** TIM PPK Kemendikbud
Gedung A Lantai 2 Komplek Kemendikbud. Jl. Jendral Sudirman, Jakarta. Telp. (62-21) 57950176
Website: http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id ; email: pendidikankarakter@kemdikbud.go.id



# Sambutan
# Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Bangsa besar adalah bangsa yang memiliki karakter kuat berdampingan dengan kompetensi yang tinggi, yang tumbuh dan berkembang dari pendidikan yang menyenangkan dan lingkungan yang menerapkan nilai-nilai baik dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan karakter yang kuat dan kompetensi yang tinggilah jati diri bangsa menjadi kokoh, kolaborasi dan daya saing bangsa meningkat sehingga mampu menjawab berbagai tantangan era abad 21. Untuk itu, pendidikan nasional harus berfokus pada penguatan karakter di samping pembentukan kompetensi.

Penguatan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen ini ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan. Atas dasar ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai tahun 2016.

Penguatan Pendidikan Karakter bukanlah suatu kebijakan baru sama sekali karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi Gerakan Nasional. Satuan pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki sistem, infrastruktur, dan dukungan ekosistem pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari perkotaan sampai pedesaan. Sudah banyak praktik baik yang

dikembangkan sekolah, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk memastikan agar proses pembudayaan nilai-nilai karakter berjalan dan berkesinambungan. Selain itu, sangat diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan bertumpu pada kearifan lokal untuk menjawab tantangan zaman yang makin kompleks, mulai dari persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa sampai kepada persaingan global. Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah yang lebih konkret agar penyemaian dan pembudayaan nilai-nilai utama pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim yang sudah menyusun dan menerbitkan buku-buku Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terdiri dari Konsep dan Pedoman PPK, Panduan Penilaian PPK, Modul Pelatihan PPK bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Komite Sekolah, serta Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Calon Pelatih PPK. Buku-buku ini akan menjadi rujukan bagi sekolah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Saya berharap PPK dapat terlaksana dengan baik dan menghimbau dukungan orang tua, komite sekolah, pengawas, perguruan tinggi dan masyarakat luas untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan dan penyempurnaan kebijakan PPK ini.

Semoga PPK dapat menumbuhkan semangat belajar dan mengoptimalkan potensi peserta didik sehingga menjadi warga negara yang memiliki karakter kuat, mencintai bangsanya dan mampu menjawab tantangan era global. Selamat berkarya.



Muhadjir Effendy

# DAFTAR ISI


| | |
|---|---|
| Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | iii |
| Daftar Isi | v |
| **BAB I PENDAHULUAN** | **1** |
| A. Rasional | 1 |
| B. Situasi Saat Ini | 6 |
| C. Nilai-Nilai Utama | 7 |
| D. Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Implementasi PPK | 10 |
| E. Fokus Gerakan PPK | 12 |
| F. Basis Gerakan PPK | 15 |
| G. Tujuan PPK | 16 |
| H. Manfaat dan Implikasi Gerakan PPK | 16 |
| I. Konsep-Konsep Dasar | 17 |
| **BAB II TATA KELOLA DAN DAYA DUKUNG** | **19** |
| A. Tata Kelola Gerakan PPK | 19 |
| B. Sarana dan Prasarana | 20 |
| C. Pembiayaan | 20 |
| D. Pelaksana dan Pemangku Kepentingan PPK | 20 |
| E. Pengembangan SDM PPK | 25 |
| **BAB III IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER** | **27** |
| A. PPK Berbasis Kelas | 27 |
| B. PPK Berbasis Budaya Sekolah | 35 |
| C. PPK Berbasis Masyarakat | 41 |

| | |
|---|---|
| **BAB IV PENDAMPINGAN** | **47** |
| A. Konsep dan Tujuan Pendampingan | **47** |
| B. Sasaran Pendampingan | **48** |
| C. Pola Pendampingan | **48** |
| **BAB V PENILAIAN DAN EVALUASI PROGRAM** | **51** |
| A. Penilaian PPK | **51** |
| B. Evaluasi Program PPK | **53** |
| Referensi | **57** |
| Lampiran | |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Rasional

Dunia abad XXI sekarang berbeda secara signifikan dengan dunia abad XX. Dalam skala makro dunia abad XXI sekarang ditandai oleh 6 (enam) kecenderungan penting, yaitu (a) berlangsungnya revolusi digital yang semakin luar biasa yang mengubah sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan, (b) terjadinya integrasi belahan-belahan dunia yang semakin intensif akibat internasionalisasi, globalisasi, hubungan-hubungan multilateral, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi, (c) berlangsungnya pendataran dunia (*the world is flat*) sebagai akibat berbagai perubahan mendasar dimensi-dimensi kehidupan manusia terutama akibat mengglobalnya negara, korporasi, dan individu, (d) sangat cepatnya perubahan dunia yang mengakibatkan dunia tampak berlari tunggang langgang, ruang tampak menyempit, waktu terasa ringkas, dan keusangan segala sesuatu cepat terjadi, (e) semakin tumbuhnya masyarakat padat pengetahuan (*knowledge society*), masyarakat informasi (*information society*), dan masyarakat jaringan (*network society*) yang membuat pengetahuan, informasi, dan jaringan menjadi modal sangat penting, dan (f) makin tegasnya fenomena abad kreatif beserta masyarakat kreatif yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai modal penting untuk individu, perusahaan, dan masyarakat. Keenam hal tersebut telah memunculkan tatanan baru, ukuran-ukuran baru, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang berbeda dengan sebelumnya, yang harus ditanggapi dan dipenuhi oleh dunia pendidikan nasional dengan sebaik-baiknya.

Dalam skala mikro pendidikan, dunia abad XXI sekarang juga ditandai oleh adanya imperatif-imperatif global pendidikan, di antaranya

Pendidikan untuk Semua (PUS), Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan (ESD), Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's), dan Literasi Dunia bagi Pemberdayaan. Selain itu, juga ditandai oleh munculnya temuan-temuan dan pemikiran-pemikiran baru yang berkenaan dengan dimensi tertentu pendidikan, di antaranya temuan neurosains pendidikan dan pembelajaran (misalnya hubungan otak dan belajar), munculnya pelbagai teori kecerdasan, tumbuhnya pemikiran baru pembelajaran (misalnya *blended learning, mindful learning*), dan kebijakan baru bidang pendidikan dan pembelajaran. Lebih jauh lagi, juga muncul pergeseran peranan dan fungsi pendidikan dalam masyarakat, tugas pranata dan lembaga pendidikan, dan bentuk organisasional pendidikan serta keberadaan modal manusia dalam pendidikan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru dalam sendi-sendi pendidikan termasuk sendi-sendi pendidikan nasional Indonesia.

Sementara itu, dalam skala regional dan nasional Indonesia, abad XXI ditandai oleh berbagai perubahan mendasar yang paradigmatis. Selain Reformasi pada penghujung abad XX, Indonesia memasuki abad XXI dengan sistem kenegaraan, pemerintahan, bahkan kemasyarakatan dan kebudayaan yang baru, misalnya orientasi baru pembangunan, desentralisasi, otonomi daerah, dan demokrasi serta bonus demografi. Di samping itu, memasuki abad XXI Indonesia mengalami keterbukaan dan interaksi global yang semakin intensif dan masif. Bagi Indonesia, bahkan tahun 2015 menjadi garis batas agenda berbagai kesepakatan dan kebijakan global dan nasional Indonesia di berbagai bidang baik bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Berkenaan dengan bidang pendidikan, sebagai contoh, tahun 2015 merupakan tahun terakhir agenda kebijakan Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Tujuan Pembangunan Milenium (*Milenium Development Goals*), dan agenda pendidikan nasional. Terkait dengan bidang non-pendidikan, tahun 2015 merupakan tahun dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN, berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan baru, dan dimulainya kebijakan baru pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, tahun 2015 menjadi tonggak penting urusan pemerintahan dan kemasyarakatan Indonesia, salah satunya urusan pendidikan nasional Indonesia.

Sehubungan dengan itu, sendi-sendi pendidikan nasional Indonesia perlu ditata kembali atau ditransformasikan sedemikian rupa sehingga pendidikan nasional Indonesia semakin sanggup memberi

kontribusi berarti bagi kiprah dan kemajuan Indonesia dalam abad XXI yang sudah mengalami perubahan mendasar yang paradigmatis sebagaimana telah disinggung di atas. Di samping itu, penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia itu dihajatkan untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru sebagai konsekuensi berbagai keadaan kekinian. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia merupakan tugas sejarah (imperatif) yang harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Dikatakan demikian karena tiga alasan. *Pertama*, bangsa-bangsa di dunia yang sekarang mengalami kemajuan sangat berarti, misalnya Jepang, Singapura, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Finlandia, telah ditopang atau disangga oleh pendidikan yang baik, bermutu, dan maju. Dalam berbagai pemeringkatan pendidikan di aras global, misalnya Learning Curve, TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), dan PISA (*Programme for International Student Assessment*), negara-negara tersebut selalu menduduki peringkat atas. *Kedua*, pelbagai studi internasional dan nasional tentang pendidikan Indonesia memberikan justifikasi betapa mendesaknya transformasi pendidikan nasional Indonesia sekarang. Laporan-laporan Bank Dunia, UNDP, dan UNESCO tentang pendidikan Indonesia merekomendasikan transformasi secara terarah pada pendidikan nasional Indonesia supaya Indonesia mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, terhindar dari jebakan-jebakan yang membawa aneka kemerosotan pada satu sisi dan pada sisi lain mampu memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. *Ketiga*, berbagai fakta dan bukti kinerja pendidikan nasional yang telah dipublikasikan oleh berbagai pihak mengamanatkan betapa mendesaknya penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia secara komprehensif dan sistemis.

Penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia tersebut dapat dimulai dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi. Dengan karakter yang kuat-tangguh beserta kompetensi yang tinggi, yang dihasilkan oleh pendidikan yang baik, pelbagai kebutuhan, tantangan, dan tuntutan baru dapat dipenuhi atau diatasi. Oleh karena itu, selain pengembangan intelektualitas, pengembangan karakter peserta didik sangatlah penting

atau utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dikatakan demikian karena pada dasarnya pendidikan bertujuan mengembangkan potensi-potensi intelektual dan karakter peserta didik.Hal ini telah dilandaskan oleh berbagai pemikiran tentang pendidikan dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. Sebagai contoh, beberapa puluh tahun lalu Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, telah menandaskan secara eksplisit bahwa *"Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelec) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita*" (Karya Ki Hadjar Dewantara Buku I: Pendidikan). Demikian juga laporan Delors untuk pendidikan abad XXI, sebagaimana tercantum dalam buku *Pembelajaran: Harta Karun di Dalamnya*, menegaskan bahwa pendidikan abad XXI bersandar pada lima tiang pembelajaran sejagat (*five pillar of learning*), yaitu *learning to know, learning to do, learning to live together,* dan *learning to be*serta *learning to transform for oneself and society*. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa **"***Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*". Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga terpapar secara tersurat berbagai kompetensi yang bersangkutan dengan karakter di samping intelektualitas. Ini semua menandakan bahwa sesungguhnya pendidikan bertugas mengembangkan karakter sekaligus intelektualitas berupa kompetensi peserta didik.

Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dapat dikatakan sudah berada pada jalur yang tepat, karena telah memberikan pendidikan karakter sekaligus membentuk intelektualitas berupa kompetensi. Meskipun demikian, proporsi penerapan pendidikan karakter dengan pendidikan intelektual belum berimbang akibat berbagai faktor. Usaha penyeimbangan pendidikan karakter dengan pembentukan

kompetensi senantiasa harus dilakukan. Demi kepentingan masa depan bangsa Indonesia, bahkan sejak sekarang perlu dilakukan pemusatan (*centering*) pendidikan karakter dalam penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia. Kesadaran sekaligus usaha pemusatan pendidikan karakter di jantung pendidikan nasional semakin kuat ketika pada tahun 2010 pemerintah Indonesia mencanangkan sekaligus melaksanakan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter berlandaskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa. Hal tersebut perlu dilanjutkan, dioptimalkan, diperdalam, dan bahkan diperluas sehingga diperlukan penguatan pendidikan karakter bangsa. Untuk itu, sejak sekarang perlu dilaksanakan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan mengindahkan asas keberlanjutan dan kesinambungan.

Gerakan PPK menempati kedudukan fundamental dan strategis pada saat pemerintah mencanangkan revolusi karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam Nawacita (Nawacita 8), menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan RPJMN 2014—2019 berlandaskan Nawacita. Sebab itu, Gerakan PPK dapat dimaknai sebagai pengejawantahan Gerakan Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita. Sebagai pengejawantahan Gerakan Nasional Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita, Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, Gerakan PPK perlu *mengintegrasikan, memperdalam, memperluas*, dan sekaligus *menyelaraskan* berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Dalam hubungan ini **pengintegrasian** dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat; **perdalaman** dan **perluasan** dapat berupa penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa, penambahan dan pemajanan kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah; kemudian **penyelerasan** dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK. Baik pada masa sekarang maupun masa akan datang, *pengintegrasian, pendalaman,*

*perluasan*, dan *penyelarasan* program dan kegiatan pendidikan karakter tersebut perlu diabdikan untuk mewujudkan revolusi mental atau revolusi karakter bangsa. Dengan demikian, Gerakan PPK merupakan jalan perwujudan Nawacita dan Gerakan Revolusi Mental di samping menjadi inti kegiatan pendidikan yang berujung pada terciptanya revolusi karakter bangsa.

**B. Situasi Saat Ini**

Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang secara intensif telah dimulai sejak tahun 2010 sudah melahirkan sekolah-sekolah rintisan yang mampu melaksanakan pembentukan karakter secara kontekstual sesuai dengan potensi lingkungan setempat. Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter 2010 juga memperoleh dukungan dari masyarakat madani dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah menyadari bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperkuat pendidikan karakter semestinya dilaksanakan oleh semua sekolah di Indonesia, bukan saja terbatas pada sekolah-sekolah binaan, sehingga peningkatan kualitas pendidikan yang adil dan merata dapat segera terjadi. Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah diharapkan dapat memperkuat bakat, potensi dan talenta seluruh peserta didik.

Lebih dari itu, pendidikan kita sesungguhnya melewatkan atau mengabaikan beberapa dimensi penting dalam pendidikan, yaitu olah raga (kinestetik), olah rasa (seni) dan olah hati (etik dan spiritual) (Effendy, 2016). Apa yang selama ini kita lakukan baru sebatas olah pikir yang menumbuhkan kecerdasan akademis. Olah pikir ini pun belum mendalam sampai kepada pengembangan berpikir tingkat tinggi, melainkan baru pada pengembangan olah pikir tingkat rendah. Persoalan ini perlu diatasi dengan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui penguatan pendidikan karakter untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat, berbudaya, dan berkarakter.

Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter untuk mengembangkan rintisan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia dengan delapan belas (18) nilai karakter. Program ini didukung oleh Pemerintah

Daerah, lembaga swadaya masyarakat sehingga program pendidikan karakter bisa terlaksana dengan baik.

Banyak satuan pendidikan telah melaksanakan praktik baik (*best practice)* dalam penerapan pendidikan karakter. Dampak dari penerapan ini adalah terjadi perubahan mendasar di dalam esosistem pendidikan dan proses pembelajaran sehingga prestasi mereka pun juga meningkat. Program PPK ingin memperkuat pembentukan karakter siswa yang selama ini sudah dilakukan di banyak sekolah.

Dalam diskusi Praktik Baik Sekolah Pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 14 September 2016, Kemendikbud menemukan bahwa sebagian besar sekolah yang diundang sudah menerapkan pendidikan karakter melalui pembiasaan dengan kegiatan penumbuhan dan pembudayaan nilai-nilai karakter yaitu yang disepakati oleh masing-masing sekolah. Kerja sama dan komitmen dari kepala sekolah, guru, dan orangtua umumnya menjadi menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di masing-masing sekolah tersebut.

Penerapan penguatan pendidikan karakter akan berjalan dengan baik bila kepala sekolah sebagai pemimpin mampu menjadi pemimpin yang dapat dipercaya dan visioner. Menjadi orang yang dapat dipercaya berarti Kepala Sekolah merupakan sosok berintegritas, mampu menjadi manajer yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembentukan karakter. Visioner berarti kepala sekolah memiliki visi jauh ke depan tentang kekhasan, keunikan, dan kualitas sekolah (*schoolbranding*) yang akan ia bangun. Kemampuan manajerial kepala sekolah untuk menggali potensi lingkungan sebagai sumber belajar dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan yang ada untuk mendukung program sekolah sangat diperlukan.

## C. Nilai-Nilai Utama

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita. Dalam hal ini butir 8 Nawacita: Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan

Revolusi Mental dalam pendidikan yang hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak, dalam mengelola sekolah. Untuk itu, Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**1. Religius**

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain.

Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.

**Subnilai religius** antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

**2. Nasionalis**

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

**Subnilai nasionalis** antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku,dan agama.

### 3. Mandiri

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.

**Subnilai mandiri** antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

### 4. Gotong Royong

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.

**Subnilai gotong royong** antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

### 5. Integritas

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral).

Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.

**Subnilai integritas** antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas).

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari nilai utama manapun pendidikan karakter dimulai, individu dan sekolah pertlu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik secara

kontekstual maupun universal. Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antarmanusia sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa nilai-nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian pula jika nilai utama nasionalis dipakai sebagai titik awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-nilai lainnya.

## D. Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Implementasi PPK

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

### Prinsip 1 – Nilai-nilai Moral Universal

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya.

### Prinsip 2 – Holistik

Gerakan PPK dilaksanakansecara holistik, dalam arti pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.

### Prinsip 3 – Terintegrasi

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan.

**Prinsip 4 – Partisipatif**

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana Gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan pembiayaan Gerakan PPK.

**Prinsip 5 – Kearifan Lokal**

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi indentitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.

**Prinsip 6 – Kecakapan Abad XXI**

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (*collaborative learning*).

**Prinsip 7 – Adil dan Inklusif**

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia.

**Prinsip 8 - Selaras dengan PerkembanganPeserta Didik**

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif.

**Prinsip 9 – Terukur**

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat dimati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan.

## E. Fokus Gerakan PPK

Gerakan PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional. Terdapat tiga struktur yang dapat digunakan sebagai wahana, jalur, dan medium untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa, yaitu: *Pertama*, **Struktur Program**, antara lain jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas guru; *Kedua*, **Struktur Kurikulum**, antara lain kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran(intrakurikuler), kokurikuler, dan ekstrakurikuler; *Ketiga*, **Struktur Kegiatan**, antara lainberbagai program dan kegiatan yang mampu mensinergikan empat dimensi pengolahan karakter dari Ki Hadjar Dewantara (olah raga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati).

### 1. Struktur Program

Struktur program meliputi jenjang dan kelas (SD kelas I-VI; SMP kelas VII-IX).Pelaksanaan Gerakan PPK pada tiap jenjang melibatkan dan memanfaatkan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Pemanfaatan dan pelibatan ekosistem pendidikan memperkuat dimensi lokal kontekstual pendidikan di daerah, sehingga Gerakan PPK tidak terlepas dari nilai-nilai karakter yang tumbuh dan berkembang pada ekosistem pendidikan yang sudah ada. Berbagai pemangku kepentingan yang ada pada ekosistem pendidikan tersebut ikut serta dan bersama-sama bertanggungjawab dan bersinergi untuk memperkuat pembentukan karakter sebagai modal dasar untuk mewujudkan warga masyarakat yang lebih berbudaya dan memiliki jati diri bangsa di masa mendatang.

Pelaku kunci dalam Gerakan PPK adalah kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lain yang relevan dalam pengembangan PPK. Masing-masing pihak perlu memahami tugas dan fungsinya dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program PPK. Lebih dari itu, kehadiran orang dewasa di lingkungan pendidikan adalah sebagai guru, yaitu mereka yang *digugu* (diikuti) dan *ditiru* (diteladani) oleh para siswa. Ini berlaku bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan.

**2. Struktur Kurikulum**

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak mengubah kurikulum yang sudah ada, melainkan optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan. Gerakan PPK perlu dilaksanakan di satuan pendidikan melalui berbagai cara sesuai dengan kerangka kurikulum yaitu alokasi waktu minimal yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh satuan pendidikan sesuai dengan peminatan dan karakteristik peserta didik, kearifan lokal, daya dukung, dan kebijaksanaan satuan pendidikan masing-masing.

Pelaksanaan Gerakan PPK disesuaikan dengan kurikulum pada satuan pendidikan masing-masing dan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Mengintegrasikan pada mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Sebagai kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, setiap guru menyusun dokumen perencanaan pembelajaran berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai mata pelajarannya masing-masing. Nilai-nilai utama PPK diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sesuai topik utama nilai PPK yang akan dikembangkan/dikuatkan pada sesi pembelajaran tersebut dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Misalnya,mata pelajaran IPA untuk SMP mengintegrasikan nilai nasionalisme dengan mendukung konservasi energi pada materi tentang energi.
2. Mengimplementasikan PPK melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pada kegiatan ekstrakurikuler, satuan pendidikan melakukan penguatan kembali nilai-nilai karakter

melalui berbagai kegiatan. Kegiatan ekskul dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pihak lain/lembaga yang relevan, seperti PMI, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, museum, rumah budaya, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas satuan pendidikan.

3. Kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. Kegiatan-kegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran untuk memperkuat pembentukan karakter sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan.

Selain struktur dalam kurikulum, gerakan PPK juga memiliki struktur pendukung lain yang terdiri atas:

a. Ekosistem dan budaya sekolah; mewujudkan tata kelola yang sehat, hubungan antarwarga sekolah yang harmonis dan saling menghargai, lingkungan sekolah yang bersih, ramah, sehat, aman, dan damai.

b. Pendidikan keluarga dan masyarakat; menjalin keselarasan antara pendidikan di sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat.

### 3. Struktur Kegiatan

Struktur kegiatan PPK merupakan pilihan berbagai macam kegiatan bagi pembentukan karakter peserta didik yang menyeimbangkan keempat dimensi pengolahan pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara, yaitu olah raga, olah pikir, olah rasa dan olah hati. Sekolah bisa memilih struktur kegiatan yang akan mendorong terbentuknya keunikan, kekhasan, dan keunggulan sekolah (*school branding*). Pilihan prioritas kegiatan PPK diharapkan dapat mendorong sekolah menemukan *branding* yang menggambarkan kekhasan dan keragaman budaya masing-masing.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung terbentuknya *branding* sekolah antara lain: kegiatan akademik, non-akademik seperti olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, pemanfaatan perpustakaan (mengatur jadwal berkunjung, mengikuti lomba perpustakaan, dan pemberian penghargaan kepada siswa dan guru yang secara rutin hadir di perpustakaan), dan pemanfaatan potensi lingkungan, seperti sanggar seni dan museum.

## F. Basis Gerakan PPK

Gerakan PPK dapat dilaksanakan dengan berbasis struktur kurikulum yang sudah ada dan mantap dimiliki oleh sekolah, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat/ komunitas (Albertus, 2015).

### 1. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas

a. Mengintegrasikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam mata pelajaran.
b. Memperkuat manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pengajaran.
c. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.

### 2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah

a. Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah.
b. Menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan.
c. Melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah.
d. Mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler.
e. Memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah.
f. Mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah.

### 3. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat

a. Memperkuat peranan Komite Sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan.
b. Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
c. Mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM.
d. Mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya

## G. Tujuan PPK

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan.
2. Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21.
3. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik).
4. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter.
5. Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah.
6. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

## H. Manfaat dan Implikasi Gerakan PPK

Gerakan PPK memiliki manfaat dan implikasi sebagai berikut:

| MANFAAT | ASPEK PENGUATAN |
|---|---|
| 1. Penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21, yaitu: berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi | 1. Revitalisasi manajemen berbasis sekolah |
| 2. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru | 2. Sinkronisasi intra-kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler, serta sekolah terintegrasi dengan kegiatan komunitas seni budaya, bahasa dan sastra, olahraga, sains, serta keagamaan |
| 3. Revitalisasi peran Kepala Sekolah sebagai manager dan Guru sebagai inspirator PPK | 3. Deregulasi penguatan kapasitas dan kewajiban Kepala Sekolah/Guru |

| | |
|---|---|
| 4. Revitalisasi Komite Sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat | 4. Penyiapan prasarana/sarana belajar (misal: pengadaan buku, konsumsi, peralatan kesenian, alat peraga, dll) melalui pembentukan jejaring kolaborasi pelibatan publik |
| 5. Penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 (lima) hari | 5. Implementasi bertahap dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan keberagaman kultural daerah/ wilayah |
| 6. Kolaborasi antar K/L, Pemda, lembaga masyarakat, penggiat pendidikan dan sumber-sumber belajar lainnya | 6. Pengorganisasian dan sistem rentang kendali pelibatan publik yang transparan dan akuntabel |

## I. Konsep-Konsep Dasar

Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengacu pada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*) sebagai manifestasi dari nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Karakter mengandung nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter merupakan kemampuan individu untuk mengatasi keterbatasan fisiknya dan kemampuannya untuk membaktikan hidupnya pada nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, karakter yang kuat membentuk individu menjadi pelaku perubahan bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya (Albertus, 2015). Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang.

Penguatan Pendidikan Karaktermerupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai falsafah hidup Pancasila. Untuk itu diperlukan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Penguatan pendidikan karakter merujuk pada lima nilai utama yang meliputi; (1) religius; (2) nasionalis; (3) mandiri; (4) gotong royong; (5) integritas. Strategi implementasi PPK di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini.

1. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah secara teratur dan terjadwal, yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Program intrakurikuler berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Dasar yang harus dimiliki peserta didik yang dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari sesuai dengan kalender akademik.
2. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang terkait dan menunjang kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan memperdalam materi intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dapat berupa penugasan, proyek, ataupun kegiatan pembelajaran lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh peserta didik.
3. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran (intrakurikuler). Aktivitas ekstrakurikuler berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kearifan lokal, dan daya dukung yang tersedia.

# BAB II
# TATA KELOLA DAN DAYA DUKUNG

## A. Tata Kelola Gerakan PPK

Pengorganisasian Gerakan PPK merupakan mekanisme koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan yang terkait dengan penyelenggaraan PPK. Seluruh pelaku membentuk jejaring dan kolaborasi secara terintegrasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Gerakan PPK diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan koordinasi sektoral antar kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan berperan menetapkan kebijakan gerakan PPK.

Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memegang peranan penting dalam mendampingi, membina, dan mengarahkan satuan pendidikan dalam pelaksanaan PPK. Kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya pendidikan untuk melaksanakan PPK. PPK dapat dilaksanakan secara integratif dan kolaboratif, sebagaimana dibahas berikut ini.

a. **Integratif** adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan karakter dengan substansi mata pelajaran secara kontekstual. Kontekstual yang dimaksud dimulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan penilaian.
b. **Kolaboratif** adalah pembelajaran yang mengkolaborasikan dan memberdayakan berbagai potensi sebagai sumber belajar dan/atau pelibatan masyarakat yang mendukung Penguatan Pendidikan Karakter.

## B. Sarana dan Prasarana

Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan gerakan PPK secara utuh dan menyeluruh. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi kewajiban pemerintah tetap perlu ditingkatkan. Sedangkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah yang dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah perlu dikembangkan. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan PPK antara lain: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kegiatan keagamaan, ruang keterampilan, ruang kesenian, fasilitas olah raga, dan peralatan pendidikan lainnya.

## C. Pembiayaan

Gerakan PPK tidak dimaksudkan untuk memberikan beban biaya tambahan pada sekolah dan orang tua. Pembiayaan pelaksanaan gerakan PPK dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara mandiri dan gotong royong. Pembiayaan pelaksanaan gerakan PPK menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan komite sekolah. Satuan pendidikan dapat juga bermitra dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, komunitas masyarakat, serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sumber-sumber pembiayaan sekolah untuk pengembangan PPK di luar pemasukan rutin sekolah perlu dikembangkan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memperhatikan peraturan-peraturan terkait dengan sumbangan pendidikan yang berlaku.

## D. Pelaksana dan Pemangku Kepentingan PPK

Pelaksanaan gerakan PPK yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya sampai dengan satuan pendidikan dapat melibatkan berbagai pelaksana dan pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing. Fungsi dan peranan masing-masing pihak dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
   a. membuat peraturan tentang pelaksanaan gerakan PPK;
   b. menyusun kebijakan pelaksanaan gerakan PPK;
   c. melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan kementerian/lembaga terkait lainnya;
   d. menyusun dan mengembangkan materi PPK;
   e. melakukan sosialisasi dan menumbuhkan inisiasi pelaksanaan gerakan PPK;
   f. melaksanaan pengembangan SDM PPK;
   g. memberikan dukungan sarana dan prasarana program PPK;
   h. mmmberikan pendampingan pelaksanaan program PPK; dan
   i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.

2. Dinas Pendidikan Provinsi
   a. melaksanakan koordinasi implementasi pelaksanaan program PPK dengan dinas pendidikan kabupaten/kota;
   b. melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat provinsi;
   c. memberikan dukungan pelaksanaan program PPK;
   d. memberikan pendampingan pelaksanaan program PPK; dan
   e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
   a. melaksanakan koordinasi implementasi pelaksanaan program PPK dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan pendidikan;
   b. melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota;
   c. memberikan dukungan pelaksanaan program PPK pada satuan pendidikan;
   d. memberikan dukungan sarana dan prasarana program PPK pada satuan pendidikan;
   e. memberikan pendampingan pelaksanaan program PPK pada satuan pendidikan; dan
   f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK di satuan pendidikan.

4. Pengawas Sekolah
   a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program PPK;
   b. mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi/ keunggulan sekolah binaan dalam implementasi PPK;
   c. memetakan *branding* implementasi PPK di sekolah-sekolah binaan untuk dijadikan rujukan bagi sekolah binaan lain;
   d. mendampingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai PPK sesuai dengan *branding* sekolah;
   e. mengevaluasi implementasi PPK di sekolah binaan;
   f. mendampingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi PPK di sekolah binaan;
   g. membantu menjelaskan secara komprehensif kepada pihak terkait/komunitas sekolah tentang konsep, tujuan, dan manfaat PPK; dan
   h. memastikan PPK diterapkan secara utuh dan menyeluruh melalui implementasi kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah binaan.

5. Satuan Pendidikan
   a. Kepala Sekolah/Ketua Yayasan
      Kepala Sekolah/Ketua Yayasan bersama dengan komunitas sekolah lainnya:
      1) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program PPK;
      2) MENYUSUN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN VISI MISI SEKOLAH;
      3) menetapkan *branding* sekolah terkait pelaksanaan program PPK;
      4) menyusun RKS dan RKAS yang mengakomodasi program PPK;
      5) melaksanakan sosialisasi program PPK di satuan pendidikan;
      6) mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan program PPK;
      7) memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program PPK;
      8) mendampingi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan program PPK;

9) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK;
10) melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK; dan
11) membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan PPK.

b. Pendidik
1) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program PPK;
2) menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian yang mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK;
3) menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif;
4) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program PPK;
5) mendukung terbentuknya relasi yang baik antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas maupun di luar kelas;
6) membangun lingkungan belajar yang mengapresiasi dan menghargai keunikan individu;
7) mengoptimalkan fungsi KKG dan MGMP untuk pengembangan pembelajaran berbasis PPK;
8) mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis PPK;
9) melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis PPK;
10) mengoptimalkan peran dan fungsi bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan program PPK; dan
11) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.

c. Tenaga Kependidikan
1) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program PPK;
2) mendukung terbentuknya relasi yang baik antartenaga kependidikan, pendidik, pesertadidik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam lingkungan satuan pendidikan; dan
3) mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis PPK.

d. Komite Sekolah
   1) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program PPK;
   2) mendukung pelaksanaan program PPK secara mandiri dan gotong royong;
   3) mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis PPK;
   4) mendukung pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah;
   5) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK; dan
   6) menciptakan suasana rumah yang kondusif dalam penanaman nilai-nilai karakter.

6. Komunitas Masyarakat dan Organisasi Profesi
   a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program PPK;
   b. memberikan dukungan pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan program PPK;
   c. menjadi mitra dan/atau relawan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program PPK sesuai dengan kompetensi dan profesi masing-masing; dan
   d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.

7. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
   a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program PPK;
   b. mendukung pelaksanaan PPK di satuan pendidikan melalui program CSR (*CorporateSocialResponsibility*);
   c. menjadi mitra dan/atau relawan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program PPK sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup DUDI masing-masing; dan
   d. memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengenal dunia kerja dalam rangka menumbuhkan jiwa kemandirian.

8. Media Massa (Cetak dan Elektronik)
   a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah dan masyarakat sebagai perwujudan dari dukungan pelaksanaan program PPK;

b. sosialisasi dan informasi yang mendukung pelaksanaan program PPK;
c. mendukung kegiatan dan menyebarluaskan praktik-praktik baik gerakan PPK kepada masyarakat;

9. Perguruan Tinggi
   a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat sebagai perwujudan dari dukungan pelaksanaan program PPK;
   b. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi terutama melalui program pengabdian masyarakat yang berbasis PPK;
   c. memberikan dukungan pada satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi masing-masing perguruan tinggi; dan
   d. menjalin kerja sama dengan satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dalam program PPK.

10. Ikatan Alumni Satuan Pendidikan
   a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah dan masyarakat sebagai perwujudan dari dukungan pelaksanaan program PPK;
   b. menjadi mitra dan/atau relawan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program PPK sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing; dan
   c. memberikan dukungan pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan program PPK.

## E. Pengembangan SDM PPK

Pelaksanaan program PPK perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan oleh berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya penyiapan dan pengembangan SDM PPK secara terencana dan terpadu. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM pendidikan, antara lain dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis. Komponen SDM yang diperlukan dalam PPK meliputi: (1) narasumber pusat, (2) fasilitator, (3) tim pendamping kabupaten/kota, (4) pengawas, (5) kepala sekolah, (6) guru, dan (7) komite sekolah.

**1. Mekanisme Pengembangan Kapasitas SDM**

Pengembangan kapasitas SDM PPK dilakukan melalui sistem pelatihan berjenjang dengan mempertimbangkan aspek jumlah sasaran, luas wilayah, serta biaya yang tersedia. Penjenjangan SDM untuk PPK adalah narasumber pusat, fasilitator provinsi, dan fasilitator sekolah.

**2. Tugas Komponen Tim PengembangKapasitas SDM PPK**

Setiap tim dalam komponen pengembangan memiliki tugas pokok berbeda sebagai bagian dari satu kesatuan pengembangan kapasitas SDM PPK, antara lain:

**a. Narasumber Pusat**

Narasumber pusat bertanggung jawab dalam: (1) melatih fasilitator di tingkat provinsi;(2) mendampingi fasilitator di tingkat provinsi pada saat melakukan pelatihan kepada pengawas dan satuan pendidikan (kepala sekolah, guru, komite sekolah); dan/atau (3) mendampingi pelaksanaan PPK di tingkat satuan pendidikan terutama di sekolah rintisan.

**b. Fasilitator Provinsi**

Fasilitator bertanggung jawab dalam; (1) melatih pengawas, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah; (2) mendampingi pelaksanaan PPK di tingkat satuan pendidikan; dan (3) melaksanakan pendampingan di sekolah mandiri.

**c. Fasilitator Sekolah**

Fasilitator sekolah bertanggung jawab dalam; (1) pengembangan tindak lanjut pasca- pelatihan di tingkat satuan pendidikan; (2) pengembangan program PPK di satuan pendidikan imbas; dan (3) pendampingan di sekolah mandiri.

# BAB III
# IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Implementasi PPK dapat dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Ketiga pendekatan ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini dapat membantu satuan pendidikan dalam merancang dan mengimplementasikan program dan kegiatan PPK.

## A. PPK Berbasis Kelas

### 1. Pengintegrasian PPK dalam kurikulum

Pengintegrasian PPK dalam kurikulum mengandung arti bahwa pendidik mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK ke dalam proses pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai utama karakter dimaksudkan untuk menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai utama PPK. Pendidik dapat memanfaatkan secara optimal materi yang sudah tersedia di dalam kurikulum secara kontekstual dengan penguatan nilai-nilai utama PPK.

Langkah-langkah menerapkan PPK melalui pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum, dapat dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan analisis KD melalui identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran;
b. mendesain RPP yang memuat fokus penguatan karakter dengan memilih metode pembelajaran dan pengelolaan (manajemen) kelas yang relevan;
c. melaksanakan pembelajaran sesuai skenario dalam RPP;
d. melaksanakan penilaian otentik atas pembelajaran yang dilakukan; dan

e. melakukan refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pembelajaran.

**2. PPK Melalui Manajemen kelas**

Manajemen kelas (pengelolaan kelas) adalah momen pendidikan yang menempatkan para guru sebagai individu yang berwenang dan memiliki otonomi dalam proses pembelajaran
untuk mengarahkan, membangun kultur pembelajaran, mengevaluasi dan mengajak seluruh komunitas kelas membuat komitmen bersama agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berhasil. Pendidik memiliki kewenangan dalam mempersiapkan (sebelum masuk kelas), mengajar, dan setelah pengajaran, dengan mempersiapkan skenario pembelajaran yang berfokus padanilai-nilai utama karakter. Manajemen kelas yang baik akan membantu peserta didik belajar dengan lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi belajar.

Dalam proses pengelolaan dan pengaturan kelas terdapat momen penguatan nilai-nilai pendidikan karakter. Contohnya, sebelum memulai pelajaran pendidik bisa mempersiapkan peserta didik untuk secara psikologis dan emosional memasuki materi pembelajaran, untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan komitmen bersama, guru bersama peserta didik membuat komitmen kelas yang akan disepakati pada saat peserta didik belajar. Aturan ini dikomunikasikan, didialogkan, dan disepakati bersama dengan peserta didik. Tujuan pengaturan kelas adalah agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan membantu setiap individu berkembang maksimal dalam belajar. Pengelolaan kelas yang baik dapat membentuk penguatan karakter. Berikut ini contoh pengelolaan kelas yang berusaha memberikan penguatan karakter.

a. Peserta didik menjadi pendengar yang baik atau menyimak saat guru memberikan penjelasan di dalam kelas (dapat menguatkan nilai saling menghargai dan toleransi).
b. Peserta didik mengangkat tangan/mengacungkan jari kepada guru sebelum mengajukan pertanyaan/tanggapan, setelah diizinkan oleh guru ia baru boleh berbicara (dapat menguatkan nilai saling menghargai dan percaya diri).
c. Pemberian sanksi yang mendidik kepada peserta didik sebagai konsekuensi dan bentuk tanggung jawab bila terjadi keterlambatan

dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas (dapat menguatkan nilai disiplin, bertanggung jawab, dan komitmen diri).

d. Guru mendorong peserta didik melakukan tutor teman sebaya, siswa yang lebih pintar diajak untuk membantu temannya yang kurang dalam belajar dan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru (dapat menguatkan nilai gotong royong, kepedulian sosial, percaya diri, dan bertanggung jawab).

Pengelolaan kelas tidak bisa diredusir sekadar sebagai pengaturan tatanan lingkungan fisik di kelas, melainkan perlu lebih berfokus pada bagaimana mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesiapan fisik, mental, psikologis, dan akademis untuk menjalani proses pembelajaran secara lebih produktif.

### 3. PPK Melalui Pilihan dan Penggunaan Metode Pembelajaran

Penguatan Pendidikan Karakter terintegrasi dalam kurikulum dilakukan melalui pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Guru harus pandai memilih agar metode pembelajaran yang digunakan secara tidak langsung menanamkan pembentukan karakter peserta didik. Metode pembelajaran yang dipilih harus dapat membantu guru dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Melalui metode tersebut diharapkan siswa memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad XXI, seperti kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (*collaborative learning*).

Beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih guru secara kontekstual, antara lain:

a. metode pembelajaran saintifik (*scientific Llearning*), sebagai metode pembelajaran yang didasarkan pada proses keilmuan dengan langkah kegiatan mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik simpulan.
b. metode *inquiry/discovery learning*, yaitu penelitian/penyingkapan. Dalam Webster's Collegiate Dictionary *inquiry* didefinisikan sebagai "bertanya tentang" atau "mencari informasi dengan cara bertanya", sedangkan dalam kamus American Heritage, *discovery* disebut

sebagai "tindakan menemukan", atau "sesuatu yang ditemukan lewat suatu tindakan".

c. metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), yaitu metode pembelajaran yang memfokuskan pada identifikasi serta pemecahan masalah nyata, praktis, kontekstual, berbentuk masalah yang strukturnya tidak jelas atau belum jelas solusinya (*ill-structured*) atau *open ended* yang ada dalam kehidupan siswa sebagai titik sentral kajian untuk dipecahkan melalui prosedur ilmiah dalam pembelajaran, yang kegiatannya biasanya dilaksanakan secara berkelompok.
d. metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata.
e. metode pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), yaitu suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil (umumnya terdiri dari 4-5 orang siswa) dengan keanggotaan yang heterogen (tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan suku/ras berbeda). Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran.
f. metode pembelajaran berbasis teks (*text-based instruction/genre-based instruction*), yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Metode pembelajaran ini mendasarkan diri pada pemodelan teks dan analisis terhadap fitur-fiturnya secara eksplisit serta fokus pada hubungan antara teks dan konteks penggunaannya. Perancangan unit-unit pembelajarannya mengarahkan siswa agar mampu memahami dan memproduksi teks baik lisan maupun tulis dalam berbagai konteks. Untuk itu, siswa perlu memahami fungsi sosial, struktur, dan fitur kebahasaan teks.

Pilihan dan penggunaan metode-metode pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain:

a. pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*)
Melalui pembelajaran ini, peserta didik berlatih bagaimana bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan sebuah proyek bersama.

Fokus nilai dan keterampilan yang menjadi sasaran dalam strategi pembelajaran kolaboratif adalah kemampuan bekerja sama.

b. presentasi
Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pemikiran, tulisan, dan kajiannya di depan kelas. Nilai yang dibangun dengan strategi ini adalah rasa percaya diri,kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan gagasan, serta kemampuan untuk mempertahankan pendapat dalam berargumentasi. Bagi peserta didik yang mempresentasikan, ia akan berlatih berargumentasi dengan baik. Bagi teman-teman sekelas, mereka akan belajar mengkritisi sebuah argumentasi dengan memberikan argumentasi lain yang lebih rasional dan berdasarkan data/fakta. Strategi ini akan memperkuat kemampuan untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik.

c. diskusi
Dalam pembelajaran, peserta didik perlu dilibatkan secara aktif bersama teman-temannya secara berkelompok, berintegrasi secara verbal, saling bertukar pikiran dan informasi, saling mempertahankan pendapat, mengajukan usulan dan gagasan yang lebih baik, serta bersama-sama memecahkan masalah tertentu dalam pembelajaran. Fokus penguatan karakter pada strategi ini adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, percaya diri, dan mempengaruhi orang lain melalui tata cara berargumentasi yang baik.

d. debat
Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk beradu argumentasi dalam sebuah perdebatan yang topiknya dipilih secara aktual dan kontekstual, agar mereka dapat mempertahankan argumentasinya secara logis, rasional, dengan bahasa yang komunikatif dan memikat perhatian pendengar (audiens). Fokus penguatan karakter pada strategi inia dalah kemampuan berpikir kritis,kemampuan berkomunikasi, percaya diri, dan mempengaruhi orang lain melalui tata cara berargumentasi yang baik.

e. pemanfaatanTIK
Dalam pembelajaran, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka menyelesaikan tugas-

tugas sekolah. Dengan memanfaatkan TIK untuk pembelajaran, diharapkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan sarana TIK lebih baik, pembelajaran pun lebih efektif dan menarik.
Fokus pada kegiatan ini adalah literasi digital.

**4. PPK Melalui Pembelajaran Tematis**

Penguatan Pendidikan Karakter melalui pembelajaran tematis adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengalokasikan waktu khusus untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu. Tema-tema yang mengandung nilai utama PPK diajarkan dalam bentuk pembelajaran di kelas ini diharapkan semakin memperkaya praksis PPK di sekolah. Satuan pendidikan mendesain sendiri tema dan prioritas nilai pendidikan karakter apa yang akan mereka tekankan. Satuan pendidikan dapat menyediakan guru khusus atau memberdayakan guru yang adauntuk mengajarkan materi tentang nilai-nilai tertentu untuk memperkuat pendidikan karakter.

**5. PPK Melalui Gerakan literasi**

Gerakan literasi merupakan kegiatan mengasah kemampuan mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan cerdas berlandaskan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara untuk menumbuhkembangkan karakter seseorang menjadi tangguh, kuat, dan baik. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan terprogram sedemikian rupa, baik dalam kegiatan-kegiatan berbasis kelas maupun kegiatan-kegiatan berbasis budaya sekolah, dan komunitas masyarakat. Dalam konteks kegiatan PPK berbasis kelas, kegiatan-kegiatan literasi dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum.

Setiap guru dapat mengajak peserta didik membaca, menulis, menyimak, dan mengomunikasikan secara teliti, cermat, dan tepat tentang suatu tema atau topik yang ada di berbagai sumber, baik buku, surat kabar, media sosial, maupun media-media lain. Dalam hubungan ini diperlukan ketersediaan sumber-sumber informasi di sekolah, antara lain buku, surat kabar, dan internet. Oleh sebab itu, keberadaan dan peranan pojok baca, perpustakaan sekolah, dan jaringan internet menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran.

Kreativitas guru merupakan faktor penting dalam menyajikan program dan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara secara cerdas, agar peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Pembiasaan membaca buku non-pelajaran selama lima belas menit sebelum pelajaran dimulai, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 23 tentang Penumbuhan Budi Pekerti perlu menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan dan memulai gerakan literasi di sekolah.

**6. PPK Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling[1]**

Penguatan Pendidikan Karakter bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pendampingan siswa dalam melalui bimbingan dan konseling. Peranan guru BK tidak terfokus hanya membantu peserta didik yang bermasalah, melainkan membantu semua peserta didik dalam pengembangan ragam potensi, meliputi pengembangan aspek belajar/akademik, karier, pribadi, dan sosial. Bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan secara kolaboratif dengan para guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, maupun orang tua dan pemangku kepentingan lainnya. Keutuhan layanan bimbingan dan konseling diwujudkan dalam landasan filosofis bimbingan dan konseling yang memandirikan, berorientasi perkembangan, dengan komponen-komponen program yang mencakup (1) layanan dasar, (2) layanan responsif, (3) perencanaan individual dan peminatan, dan (4) dukungan sistem (sesuai Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).

Lima nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas sangat sejalan dengan filosofi bimbingan dan konseling yang memandirikan. Peran dan tanggung jawab bimbingan dan konseling dalam PPK adalah pengembangan perilaku jangka panjang yang menyangkut lima nilai utama tersebut sebagai kekuatan nilai pada pribadi individu di dalam mengembangkan potensi di bidang belajar, karier, pribadi, dan sosial.

Penguatan pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan dan konseling dapat diselenggarakan melalui layanan-layanan berikut.

1. Untuk Sekolah Dasar ditekankan kepada penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran yang terintegrasi dengan PPK.
2. Untuk SMP, SMA, SMK dilatihkan khusus kepada Guru Bimbingan dan Konseling

1. Layanan Dasar

Layanan dasar adalah pendampingan yang diperuntukkan bagi seluruh peserta didik (konseli) melalui kegiatan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok untuk mengembangkan perilaku jangka panjang dalam pengembangan perilaku belajar, karier, pribadi, dan sosial. Nilai-nilai utama PPK diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam pengembangan perilaku belajar/akademik, karier, pribadi, dan sosial yang dikemas ke dalam topik atau tema tertentu dan dituangkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (RPLBK). Layanan dasar merupakan momen utama BK yang paling memungkinkan integrasi nilai-nilai utama PPK ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Integrasi nilai-nilai utama PPK ke dalam pengembangan perilaku belajar, karier, pribadi, dan sosial dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut.

a. Kembangkan dan pilih nilai utama (atau unsur-unsur nilai utama) yang relevan dengan bidang pengembangan belajar, karier, pribadi, atau sosial.
b. Kembangkan topik-topik atau tema satuan layanan yang mengandung perilaku nilai utama PPK dan perilaku belajar, karier, pribadi, atau sosial. Petakan ke dalam program semester/tahunan.
c. Kembangkan RPLBK sesuai standar dan kebutuhan secara kontekstual.
d. Implementasikan RPLBK bermuatan nilai-nilai utama PPK melalui sistem peluncuran *(delivery systems)* bimbingan dan konseling. Di dalam implementasi RPLBK bisa berkolaborasi dan/atau dikolaborasikan dengan kegiatan PPK berbasis lainnya.

2. Layanan Responsif

Layanan responsif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik tertentu, baik individual maupun kelompok, yang memerlukan bantuan segera agar peserta didik tidak terhambat dalam pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Bantuan diberikan melalui konseling,konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan (pengalihan penanganan konseli pada ahli lain karena sudah di luar kewenangan konselor/guru BK). Nilai-nilai utama PPK diinkorporasikan dalam proses pemberian bantuan baik secara individual maupun kelompok.

3. Layanan Perencanaan Individual dan Peminatan

Layanan ini dimaksudkan untuk membantu setiap peserta didik dalam pengembangan bakat dan minatnya, melalui pemahaman diri, pemahaman lingkungan, dan pemilihan program yang cocok dengan bakat dan minatnya. Nilai-nilai utama PPK diinkorporasikan dalam proses pemahaman diri dan penguatan pilihan serta pembelajaran dalam pengembangan bakat dan minat. Pembelajaran sebagaimana disebutkan, lebih merupakan tanggung jawab guru mata pelajaran atau bidang yang sesuai dengan minat peserta didik.

4. Dukungan Sistem

Dukungan sistem terkait dengan aspek manajemen dan kepemimpinan sekolah di dalam mendukung layanan bimbingan dan konseling untuk memperkuat PPK. Dukungan sistem ini termasuk di dalamnya kebijakan, ketenagaan, dana, dan fasilitas.

## B. PPK Berbasis Budaya Sekolah

Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung praksis PPK mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. Pengembangan PPK berbasis budaya sekolah termasuk di dalamnya keseluruhan tata kelola sekolah, desain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah.

Penguatan Pendidikan Karakter berbasis budaya sekolah berfokus pada pembiasaan dan pembentukan budaya yang merepresentasikan nilai-nilai utama PPK yang menjadi prioritas satuan pendidikan. Pembiasaan ini diintegrasikan dalam keseluruhan kegiatan di sekolah yang tercermin dari suasana dan lingkungan sekolah yang kondusif.

Langkah-langkah pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah, antara lain dapat dilaksanakan dengan cara:

### 1. Menentukan Nilai Utama PPK

Sekolah memulai program PPK dengan melakukan asesmen awal. Salah satu kegiatan asesmen awal adalah bahwa satuan pendidikan memilih nilai utama yang akan menjadi fokus dalam pengembangan

pembentukan dan penguatan karakter di lingkungan mereka. Pemilihan nilai utama ini didiskusikan, dimusyawarahkan, dan didialogkan dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan peserta didik). Bersamaan dengan itu, dirumuskan pula sejumlah nilai pendukung yang dipilih dan relevan. Sekolah mendeskripsikan bagaimana jalinan antarnilai utama tersebut, yaitu antarnilai utama yang dipilih dengan nilai pendukung.. Seluruh pemangku kepentingan menyepakati nilai utama yang menjadi prioritas serta nilai pendukung, dan jalinan antarnilai dalam membentuk karakter warga sekolah, dan sekaligus tertuang dalam visi dan misi sekolah.

Nilai utama yang dipilih oleh satuan pendidikan menjadi fokus dalam rangka pengembangan budaya dan identitas sekolah. Seluruh kegiatan, program, dan pengembangan karakter di lingkungan satuan pendidikan berpusat pada nilai utama tersebut, dan berlaku bagi semua komunitas sekolah.

Satuan pendidikan menjabarkan nilai utama ini dalam indikator dan bentuk perilaku objektif yang bisa diamati dan diverifikasi. Dengan menentukan indikator, satuan pendidikan dapat menumbuhkan nilai-nilai pendukung yang lain melalui fokus pengalaman komunitas sekolah terhadap implementasi nilai tersebut.

Dari nilai utama dan nilai-nilai pendukung yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh satuan pendidikan, sekolah bisa membuat ***tagline*** yang menjadi **moto** satuan pendidikan tersebut sehingga menunjukkan keunikan, kekhasan, dan keunggulan sekolah. Contoh: "Membentuk Pemimpin Berintegritas","Sekolah Cinta", "Sekolah Budaya", dan lain-lain. Satuan pendidikan dapat pula membuat logo sekolah, himne, dan mars sekolah yang sesuai dengan *branding*-nya masing-masing.

### a. Menyusun Jadwal Harian/Mingguan

Satuan pendidikan dapat menyusun jadwal kegiatan harian atau mingguan untuk memperkuat nilai-nilai utama PPK yang telah dipilih sebagai upaya penguatan secara habituasi dan terintegrasi.

Contoh : Tabel1
(Bagan Kegiatan Mingguan)

<table>
<tr><th>Hari</th><th colspan="5">Senin</th><th>Selasa</th><th>Rabu</th><th>Kamis</th><th>Jumat</th><th>Sabtu</th><th>Minggu</th></tr>
<tr><td>Nilai Karakter**</td><td colspan="5">Penguatan Nilai-nilai Utama:<br>Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, Integritas</td><td colspan="4"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Waktu Belajar*</td><td colspan="5">Kegiatan Pembiasaan:<br>Memulai hari dengan upacara bendera(Senin), apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya,lagu-lagu nasional, dan berdoa bersama.<br>Membaca buku non-pelajaran yang berisi nilai-nilai karakter, berupa kearifan lokal, nasional, dan global, gerakan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.</td><td colspan="4">Kegiatan PPK bersamaorang tua:<br>Interaksi dengan orang tua dan lingkungan, serta sesama.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Kegiatan Intrakurikuler:<br>Kegiatan Belajar-Mengajar<br>Layanan Bimbingan dan Konseling</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler:<br>Sesuai minat dan bakat peserta didik yang dilakukan di bawah bimbingan guru/pelatih, atau dapat juga melibatkan orang tua dan masyarakat.<br>Kegiatan Keagamaan, Pramuka, PMR, Paskibra, Bela Negara, Kesenian, Bahasa&Sastra, Karya Ilmiah Remaja,Jurnalistik,Olahraga,dsb.<br><br>Kegiatan Pembiasaan:<br>Sebelum menutup hari,peserta didik melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah, dan berdoá bersama.</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

**Keterangan :**

*) Durasi waktu tidak mengikat dan disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing.

**) Nilai-nilai utama karakter disesuaikan dengan GNRM, visi dan misi sekolah, kreativitas sekolah, serta kearifan lokal.

**b. Mendesain KurikulumTingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**

Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk KurikulumTingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP tersebut memuat dan/atau mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK serta nilai-nilai pendukung lainnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

**Langkah1**

Memeriksa kelengkapan dokumen kurikulum yang terdiri dari:

a. Dokumen1 yang disebut dengan *Buku I Kurikulum Sekolah*, berisi sekurang- kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan.

   Contoh:
   Memasukkan nilai-nilai utama PPK pada visi dan misi sekolah. Nilai-nilai karakter dimaksud dapat diambil dari lima nilai utama dan/atau subnilai lainnya yang relevan dengan kearifan dan budaya sekolah.

b. Dokumen 2 yang disebut dengan *Buku II Kurikulum Sekolah,* berisi silabus.

   Contoh:
   Silabus merupakan rencana pembelajaran dan dikembangkan oleh satuan pendidikan, yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok/pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan seterusnya. Silabus sebaiknya dipastikan diberi muatan nilai-nilai karakter yang dituangkan secara eksplisit, meskipun dalam implementasinya dapat dikembangkan secara relevan dan kontekstual.

c. Dokumen 3 yang disebut dengan *Buku III Kurikulum Sekolah,* berisi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP),yang disusun sesuai kompetensi dasar, potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar.

   Contoh:
   RPP yang dibuat sebaiknya secara sengaja memuat nilai-nilai karakter. Hal ini dapat dilakukan dengan bukan sekadar menambahkan komponen "fokus penguatan karakter" setelah indikator atau tujuan

dalam RPP tersebut, yang berfungsi sebagai "pengingat", melainkan juga menuliskan pada kompetensi dasar mana pembentukan karakter itu akan diajarkan, disadarkan dan dibahas, dan bagaimana mengajarkannya.

d. Penyusunan/pengembangan KTSP tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan, dan dilakukan oleh tim pengembang KTSP, di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

   Contoh:
   Sekolah dapat melakukan Penguatan Pendidikan Karakter melalui dokumen KTSP dengan:
   1) melakukan penyesuaian nilai-nilai karakter yang sudah dilaksanakan di sekolah dengan nilai-nilai utama PPK;
   2) menyesuaikan visi dan misi sekolah sesuai dengan keadaan sekolah;
   3) menyesuaikan program kurikulum, terutama program di siang dan sore hari yang dimasukkan dalam dokumen kurikulum sekolah; dan
   4) membuat rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan PPK dan menyesuaikan dengan kalender akademik sekolah.

**Langkah2**

Melaksanakan sosialisasi penguatan pendidikan karakter (PPK) kepada seluruh komunitas sekolah (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta komite sekolah dan semua komponen yang ada di sekolah).

**Langkah 3**

Membuat dan menyepakati komitmen bersama antarsemua pihak (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta komite sekolah dan semua komponen yang ada di sekolah), serta para pemangku kepentingan pendidikan untuk mendukung dan melaksanakan PPK sesuai dengan strategi implementasi yang sudah direncanakan, baik secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

**c. Evaluasi Peraturan Sekolah**

Budaya sekolah yang baik terlihat dalam konsep pengelolaan sekolah yang mengarah pada pembentukan dan penguatan karakter. Sebagai sebuah gerakan nasional, setiap lembaga pendidikan wajib melakukan koreksi dan evaluasi atas berbagai peraturan yang mereka miliki dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai revolusi mental yang ingin diarahkan pada penguatan pendidikan karakter. Salah satu contoh peraturan yang wajib dievaluasi adalah peraturan kedisplinan tentang sakit, izin, dan alpa, penerapan kebijakan kriteria ketuntasan minimal (KKM), dan peraturan terkait kegiatan mencontek.

Penguatan pendidikan karakter perlu mempergunakan sarana yang sudah ada dan memiliki indikator yang jelas, terukur, dan objektif tentang penguatan pendidikan karakter. Evaluasi praksis pemanfaatan peraturan sekolah tentang kehadiran dibutuhkan agar peraturan ini dapat menjadi sarana efektif dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik.

Selain peraturan tentang kedisplinan, sekolah juga perlu mengadakan evaluasi atas peraturan-peraturan lain, untuk melihat apakah peraturan sekolah yang ada telah mampu membentuk karakter peserta didik atau justru malah melemahkannya. Upaya telaah, analisis, dan revisi pada berbagai bentuk aturan ini sangat penting dalam rangka menghadirkan kultur pembentukan dan penguatan karakter yang mendorong peserta didik menjadi pembelajaran otentik, dimana peserta didik dapat belajar dari pengalaman yang mereka lalui/rasakan sesuai dengan tahapan perkembangan masing-masing.

Dalam upaya pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah, sekolah dapat membuat atau merevisi peraturan dan tata tertib sekolah secara bersama-sama dengan melibatkan semua komponen sekolah yang terkait. Dengan demikian, semangat menegakkan peraturan tersebut semakin besar karena dibangun secara bersama.

**d. Pengembangan Tradisi Sekolah**

Satuan pendidikan dapat mengembangkan PPK berbasis budaya sekolah dengan memperkuat tradisi yang sudah dimiliki oleh sekolah. Selain mengembangkan yang sudah baik, satuan pendidikan tetap perlu mengevaluasi dan merefleksi diri, apakah tradisi yang diwariskan dalam satuan pendidikan tersebut masih relevan dengan kebutuhan dan kondisi

sekarang atau perlu direvisi kembali, agar dapat menjawab tantangan yang berkembang, serta selaras dengan upaya penguatan karakter di satuan pendidikan tersebut.

**e. Pengembangan Kegiatan kokurikuler**

Kegiatan kokurikuler dilakukan melalui serangkaian penugasan yang sesuai dengan target pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran yang relevan dengan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dapat dilaksanakan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, tetapi kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan perencanaan pembelajaran (silabus dan RPP) yangtelah disusun guru. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan siswa di luar lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab dan pengawasan guru yang bersangkutan. Jenis-jenis kegiatannya antara lain berupa tugas-tugas, baik dilaksanakan secara individu maupun kelompok. Contohnya, dapat berupa kegiatan proyek, penelitian, praktikum, pengamatan, wawancara, latihan-latihan seni dan olah raga, atau kegiatan produktif lainnya.

**f. Ekstrakurikuler (Wajib dan Pilihan)**

Penguatan nilai-nilai utama PPK sangat dimungkinkan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler (ekskul). Kegiatan ekskul tersebut bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan bakat peserta didik, sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing.

Kegiatan ekskul ada duajenis, yaitu ekskul wajib (pendidikan kepramukaan) dan ekskul pilihan (sesuai dengan kegiatan ekskul yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan).

Semua kegiatan ekskul yang dikembangkan tersebut harus memuat dan menegaskan nilai-nilai karakter yang dikembangan dalam setiap bentuk kegiatan yang dilakukan.Meskipun secara implisit kegiatan ekskul sudah mengandung nilai-nilai karakter, namun tetap harus diungkap secara eksplisit serta direfleksikan dan ditegaskan kembali di akhir kegiatan, agar peserta didik sadar dan paham.

## C. PPK Berbasis Masyarakat

Satuan pendidikan tidak dapat menutup diri dari kemungkinan berkolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat lain di luar lingkungan sekolah. Pelibatan publik dibutuhkan karena sekolah tidak

dapat melaksanakan visi dan misinya sendiri. Karena itu, berbagai macam bentuk kolaborasi dan kerja sama antarkomunitas dan satuan pendidikan diluar sekolah sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter.

Satuan pendidikan dapat melakukan berbagai kolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan organisasi lain di luar satuan pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam Penguatan Pendidikan Karakter. Yang dimaksud dengan komunitas yang berada di luar satuan pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. komunitas orang tua-peserta didik atau paguyuban orang tua, baik itu per-kelas maupun per-sekolah;
2. komunitas pengelola pusat kesenian dan budaya, yaitu berbagai perkumpulan, kelompok hobi, sanggar kesenian, bengkel teater, padepokan silat, studio musik, bengkel seni, dan lain-lain, yang merupakan pusat-pusat pengembangan kebudayaan lokal dan modern;
3. lembaga-lembaga pemerintahan (BNN, Kepolisian, KPK, Kemenkes, Kemenpora, dan lain-lain);
4. lembaga atau komunitas yang menyediakan sumber-sumber pembelajaran (perpustakaan, museum, situs budaya, cagar budaya, paguyuban pecinta lingkungan, komunitas hewan piaraan, dan lain-lain);
5. komunitas masyarakat sipil pegiat pendidikan;
6. komunitas keagamaan;
7. komunitas seniman dan budayawan lokal (pemusik, perupa, penari, pelukis, dan lain-lain);
8. lembaga bisnis dan perusahaan yang memiliki relevansi dan komitmen dengan dunia pendidikan;
9. lembaga penyiaran media, seperti televisi, koran, majalah, radio, dan lain-lain.

Beberapa prinsip pengembangan program Penguatan Pendidikan Karakter melalui kerja sama/kolaborasi dengan komunitas antara lain:

1. penanggung jawab utama dalam setiap program dan kegiatan PPK di lingkungan sekolah adalah kepala sekolah;
2. kolaborasi bertujuan untuk memperkuat PPK bagi seluruh anggota komunitas sekolah;
3. fokus kolaborasi PPK dengan komunitas terutama diperuntukkan bagi peserta didik;

4. rasional atau alasan mengapa sekolah melakukan kolaborasi dengan komunitas tertentu perlu didiskusikan dan dikomunikasikan pada seluruh komunitas sekolah;
5. satuan pendidikan wajib membuat dokumentasi kegiatan mulai dari pembuatan proposal, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan;
6. prinsip kolaborasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum PPK, tidak melanggar nilai-nilai moral, dan tidak menjadikan sekolah sebagai objek pemasaran produk tertentu.

Ada berbagai bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan PPK dengan berbagai komunitas diluar sekolah. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk kolaborasi dengan komunitas yang dapat membantu penguatan program pendidikan karakter di sekolah yang berfokus pada penguatan kekayaan pengetahuan peserta didik dalam rangka pembelajaran. Bentuk kolaborasi itu antara lain :

**1. Pembelajaran Berbasis Museum, Cagar Budaya, dan Sanggar Seni**

Sekolah dapat melaksanakan program PPK berbasis masyarakat dengan bekerja sama memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar mereka. Bila di sebuah daerah terdapat museum yang bisa menjadi sarana dan sumber pembelajaran bagi peserta didik, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pengelola museum, cagar budaya, kelompok hobi, komunitas budaya, dan sanggar untuk memperkenalkan kekayaan-kekayaan koleksinya, mengajak peserta didik untuk mempelajari kekayaan daerahnya, dan mampu menjaga kekayaan warisan budaya yang mereka miliki.

**2. *Mentoring* dengan Seniman dan Budayawan Lokal**

Satuan pendidikan juga dapat bekerja sama dengan komunitas para seniman, penyair,dan sastrawan di lingkungan mereka, agar peserta didik mampu memperoleh pengetahuan dan pengalaman terkait dengan profesi seniman dan sastrawan. Bila sebuah satuan pendidikan memiliki tokoh-tokoh budayawan dan seniman lokal, dan memiliki tradisi dan kesenian khusus, satuan pendidikan tersebut dapat membangun kolaborasi dan kerja sama untuk pengembangan kesenimanan peserta didik melalui program *mentoring, tutoring*, seniman masuksekolah, atau belajar bersama maestro.

**3. Kelas Inspirasi**

Setiap kelas bisa mengadakan kelas yang memberikan inspirasi bagi peserta didik dengan mendatangkan individu dari luar yang memiliki profesi sangat beragam. Satuan pendidikan dapat mengundang narasumber dari kalangan orang tua maupun tokoh masyarakat setempat. Orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat bisa menjadi sumber pembelajaran yang menginspirasi nilai-nilai pembentukan dan penguatan karakter dalam diri peserta didik. Kelas inspirasi bertujuan agar setiap peserta didik memperoleh inspirasi dari pengalaman para tokoh dan profesional yang telah berhasil di bidang kehidupan profesimereka, sehingga kehadiran mereka dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar dan prestasi mereka.

**4. Program Siaran Radion *On-air***

Satuan pendidikan bisa bekerja sama dengan media cetak, elektronik, dan penyiaran untuk mempromosikan nilai-nilai penguatan karakter ke dalam masyarakat, dan mengajak peserta didik untuk menjadi teladan dalam pemikiran dan tindakan. Satuan pendidikan bisa mengadakan kerja sama untuk siaran *onair* yang membahas tentang penguatan pendidikan karakter di sekolah. Diskusi antara sekolah, guru, orang tua, peserta didik,dan masyarakat secara *on air* tentang tema-tema pendidikan karakter bisa membantu masyarakat menyadari pentingnya pemahaman dan pengertian yang baik tentang pendidikan karakter dan berbagai macam persoalan yang melingkupinya.

**5. Kolaborasi dengan Media Televisi, Koran, dan Majalah**

Satuan pendidikan bisa melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stasiun televisi untuk peliputan maupun pembuatan kegiatan terkait dengan penguatan program pendidikan karakter disekolah. Seluruh media ini dapat menjadi mitra bagi lembaga pendidikan dalam rangka memperkuat dan mempromosikan pendidikan karakter.

**6. Gerakan Literasi**

Untuk meningkatkan berbagai kemampuan literasi di dalam diri peserta didik, setiap sekolah bisa membangun kerja sama dengan instansi lain yang relevan dalam rangka pengembangan literasi

sekolah, seperti toko buku, penerbit, dan percetakan, gerakan masyarakat peduli literasi pendidikan, sanggar-sanggar baca, perpustakaan daerah, dan perpustakaan nasional.

**7. Literasi Digital**

Pentingnya literasi digital juga bisa digalakkan oleh satuan pendidikan dengan memanfaatkan kerjasama melalui berbagai pihak terkait, seperti Menkominfo, maupun organisasi-organisasi dan pegiat literasi digital. Inti dari kegiatan ini adalah memperkuat kemampuan literasi digital peserta didik.

**8. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi: Riset Dosen-Guru**

Satuan pendidikan bias bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan kapasitas guru. Perguruan tinggi memiliki salah satu misi mereka terkait dengan pengabdian masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat ini, perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas pendidik. Selain itu, satuan pendidikan bias membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran para guru, dan sebaliknya perguruan tinggi bias memanfaatkan pengalaman satuan pendidikan sebagai laboratorium bagi pengembangan teori-teori pendidikan dan pembelajaran, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pendidik.

**9. Program Magang Kerja**

Satuan pendidikan bisa bekerja sama dengan komunitas bisnis untuk menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi para peserta didik agar dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang mereka pelajari dilingkungan kerja secara nyata. Program magang diperusahaan dan tempat-tempat bekerja bisa menjadi kegiatan untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik, sehingga memiliki pengalaman yang lebih luas terkait disiplin ilmu yang sedang dipelajarinya.

**10. Kerja Sama dengan Komunitas Keagamaan**

Untuk sekolah-sekolah dengan ciri khas keagamaan tertentu, pembentukan nilai-nilai spiritual dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga dan komunitas keagamaan

tertentu yang mampu membantu menumbuhkan semangat kerohanian yang mendalam, terbuka pada dialog, yang akan membantu setiap individu, terutama peserta didik agar dapat memiliki pemahaman dan praktik ajaran iman yang benar dan toleran. Kerja sama dengan komunitas keagamaan ini bisa dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memang menyediakan layanan untuk pengembangan keagamaan khusus, sesuai dengan agama masing-masing peserta didik.

# BAB IV
# PENDAMPINGAN

## A. Konsep dan Tujuan Pendampingan

Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pendampingan sekolah-sekolah pelaksana PPK agar sosialisasi dan diseminasi PPK berjalan dengan lebih cepat dan efektif. Pendampingan merupakan kegiatan fasilitasi kepada sekolah yang melaksanakan program PPK untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya berbagai macam inisiatif dalam proses pelaksanaan PPK. Melalui pendampingan diharapkan muncul kemandirian sekolah dan pengimbasan PPK secara berkelanjutan.

Tujuan pendampingan adalah untuk membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan PPK di satuan pendidikan sehingga sekolah yang didampingi mampu melaksanakan PPK sesuai dengan tujuan yang ingin diraih dan menjadi sekolah pengimbas PPK di lingkungan sekitarnya.

Tim pendamping program PPK meliputi:

### 1. Narasumber Pusat

Narasumber pusat terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, praktisi pendidikan, dan akademisi. Narasumber pusat ini bertanggung jawab dalam mendampingi pelaksanaan PPK di sekolah rintisan baik tahap 1 dan 2 pada tahun 2016 serta sekolah rintisan tahap 3 pada tahun 2017. Narasumber pusat juga bertanggung jawab atas pelatihan PPK yang dilakukan oleh fasilitator provinsi ke sekolah-sekolah.

### 2. Fasilitator Provinsi

Fasilitator Provinsi merupakan tim pendamping yang terdiri kepala sekolah, guru, komite sekolah yang berasal dari satuan pendidikan rintisan PPK tahap 1,2, maupun 3 yang telah dilatih oleh Narasumber

Pusat. Selain, tim pendamping yang berasal dari satuan pendidikan rintisan, Fasilitator Provinsi juga terdiri dari unsur LPMP dan P4TK yang telah memperoleh pelatihan dari Narasumber Pusat. Fasilitator provinsi bertanggung jawab untuk mendampingi pelaksanaan PPK di sekolah rintisan, sekolah mandiri dan sekolah imbas di sekitar wilayah sekolah rintisan PPK.

**3. Fasilitator Sekolah**

Fasilitator sekolah terdiri dari unsur kepala sekolah, guru, dan komite sekolah yang telah dilatih oleh LPMP/P4TK. Fasilitator sekolah bertanggungjawab untuk melaksanakan PPK di sekolahnya sendiri, dan mendampingi pelaksanaan PPK di sekolah imbas lainnya.

## B. Sasaran Pendampingan

Sasaran pendampingan program PPK adalah guru, kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah di sekolah rintisan, sekolah imbas, sekolah mandiri, dan sekolah daerah rintisan mandiri.

- Sekolah Rintisan adalah sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan PPK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD dan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP. Sekolah Rintisan terbagi menjadi tiga, yaitu sekolah rintisan tahap 1, sekolah rintisan tahap 2, dan sekolah rintisan tahap 3. Sekolah rintisan mendapatkan pelatihan PPK dari narasumber pusat.
- Sekolah imbas adalah sekolah di sekitar sekolah rintisan PPK. Sekolah imbas memperoleh pendampingan pelatihan PPK dari fasilitator sekolah rintisan dan menjadi mitra sekolah rintisan.
- Sekolah mandiri adalah sekolah yang berinisiatif menerapkan PPK secara mandiri dari sisi tata kelola dan pembiayaan.
- Sekolah daerah rintisan mandiri adalah sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan PPK berdasarkan surat keputusan Pemda kabupaten/kota masing-masing yang berinisiatif secara mandiri melaksanakan PPK.

## C. Pola Pendampingan

Pola umum pendampingan dilakukan secara berjenjang dan bertingkat sesuai dengan status sekolah pelaksana PPK. Pola umum

pendampingan adalah melalui pelatihan langsung untuk penguatan kapasitas pelaku pendidikan (kepala sekolah, guru, komite sekolah. dan pengawas) dan pendampingan langsung di sekolah. Pola pendampingan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pendampingan Sekolah Rintisan**

   Pendampingan sekolah rintisan dilakukan secara langsung oleh narasumber pusat. Narasumber pusat bertanggung jawab memantau dan mendampingi sekolah-sekolah rintisan PPK untuk mengimplementasikan PPK dan mempersiapkan fasilitator sekolah untuk mengembangkan sekolah imbas. Proses pendampingan PPK di sekolah yang didampingi berlangsung selama empat hingga lima bulan lamanya. Setelah masa pendampingan dilakukan dievaluasi dan penilaian untuk menilai keberhasilannya.

2. **Pendampingan Sekolah Imbas**

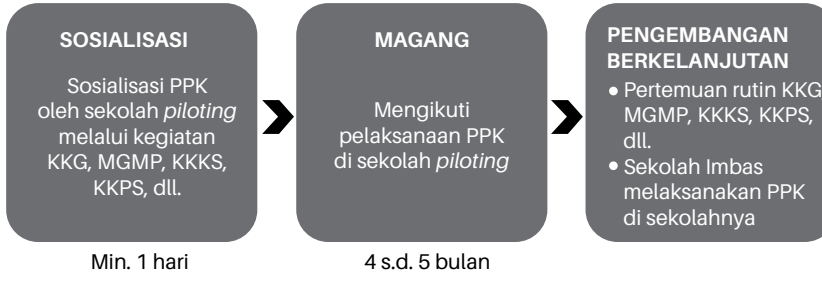
   Sekolah imbas merupakan sekolah yang berada di sekitar sekolah piloting yang menjadi mitra dari sekolah rintisan tersebut. Pendampingan sekolah imbas dilakukan oleh fasilitator sekolah rintisan dibantu oleh fasilitator provinsi yang berasal dari LPMP/P4TK, dengan tahapan pendampingan sebagai berikut:

   a. Sosialisasi
      Kegiatan sosialisasi merupakan pembekalan materi mengenai konsep dasar dan implementasi PPK yang dilakukan oleh sekolah rintisan melalui kegiatan KKG, MGMP, KKKS, KKPS, dll, selama kurun waktu minimal 1 (satu) hari.

   b. Magang
      Kegiatan magang merupakan kesempatan bagi sekolah imbas untuk belajar secara langsung dan mengikuti pelaksanaan PPK yang diselenggarakan di sekolah rintisan selama kurun waktu empat sampai dengan lima bulan sesuai dengan kebutuhan sekolah imbas.

   c. Pengembangan Berkelanjutan
      Setelah memperoleh sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator sekolah rintisan, sekolah immbas selanjutnya melaksanakan PPK di masing-masing sekolah. Pengembangan

berkelanjutan di sekolah imbas dapat dilakukan melalui pertemuan rutin KKG, MGMP, KKKS, KKPS, dan kanal-kanal komunikasi lain yang membantu fasilitasi pelaksanaan PPK.




Tahapan pendampingan Sekolah Imbas

**3. Pendampingan Sekolah Mandiri**

Pendampingan PPK di sekolah mandiri dilakukan sesuai dengan inisiatif dari sekolah-sekolah yang mengajukan diri sebagai sekolah PPK. Pendampingan sekolah mandiri terutama dilakukan oleh fasilitator provinsi dan fasilitator sekolah rintisan yang ada di daerah tersebut. Narasumber pusat bertanggung jawab untuk melakukan supervisi fasilitator provinsi agar pendampingan sekolah mandiri berjalan dengan baik.

**4. Pendampingan Sekolah Daerah Rintisan Mandiri**

Pendampingan sekolah-sekolah pelaksana PPK di daerah rintisan mandiri dilakukan berdasarkan inisiatif daerah tersebut. Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah daerah rintisan mandiri dilakukan oleh narasumber pusat, LPMP dan/atau P4TK. Fasilitator sekolah rintisan yang berada di daerah rintisan mandiri juga bisa dilibatkan dalam pendampingan sekolah daerah rintisan mandiri.

# BAB V
# PENILAIAN DAN EVALUASI PROGRAM

Pogram Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) perlu dinilai dan dievaluasi secara terukur dan komprehensif. Kegiatan penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan teratur untuk memberi jaminan bahwa gerakan PPK telah memberikan dampak signifikan pada perubahan perilaku, budaya sekolah, dan prestasi peserta didik. Penilaian dan evaluasi PPK bertujuan untuk mengukur keberhasilan implementasi nilai-nilai utama PPK sebagai sebuah gerakan nasional revolusi mental dalam lembaga pendidikan.

Penilaian kegiatan PPK mengacu pada tahapan-tahapan penerapan PPK yang selaras dengan prinsip-prinsip implementasi PPK serta indikator-indikator objektif yang menyertainya.Penilaian PPK dilakukan secara berkesinambungan, komprehensif, objektif, jujur,dan transparan, serta melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan.

## A. Penilaian PPK

Tujuan kegiatan penilaian adalah untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan gerakan PPK pada satu satuan pendidikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan, misalnya per tiga bulan dan enam bulan atau satu semester yang dilanjutkan secara berkesinambungan untuk waktu-waktu berikutnya.

Yang melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan PPK adalah kepala sekolah (internal) dan pihak luar sekolah (eksternal). Penilaian secara internal dilakukan oleh warga sekolah (kepala sekolah, guru, wali murid, komite sekolah). Penilaian secara eksternal dilakukan oleh pihak-pihak dari luar sekolah yang memiliki kepentingan bersama untuk menyukseskan pelaksanaan gerakan PPK, misalnya tim penilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Dinas Pendidikan, pengawas, perguruan tinggi, komunitas-komonitas yang bekerja sama dengan

sekolah, dan lain-lain. Penilaian dilakukan dengan mendasarkan diri pada Panduan Penilaian Keberhasilan PPK.

Penilaian PPK dimulai dengan mengevaluasi asesmen awal yang dilakukan oleh sekolah. Asesmen dimaksudkan untuk mempelajari kondisi awal dan memastikan taraf kesiapan sekolah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan gerakan PPK. Dengan mengetahui kondisi awal yang ada di sekolah, dapat disusun gerakan PPK yang lebih realistik, sesuai dengan kearifan lokal, budaya setempat, mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan, dan program-program yang dilaksanakan bisa tepat sasaran.

Aspek-aspek yang perlu dilakukan assesmen antara lain kondisi-kondisi yang dapat mendukung dan tidak mendukung implementasi gerakan PPK di sekolah, baik kondisi yang berkaitan dengan siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, iklim yang kondusif di sekolah, kebutuhan untuk menjadi lebih baik dari warga sekolah, dan dukungan yang diperoleh dari pemangku kepentingan; misalnya dari pemerintah pusat/daerah, perguruan tinggi, komunitas, perusahaan, dan perkumpulan atau organisasi yang ada di masyarakat.

Metode penilaian adalah melalui observasi (pengamatan langsung), wawancara, dan verfikasi data-data dan dokumentasi yang mendukung proses penilaian PPK.

Observasi yang dilakukan terhadap lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial sekolah, dan budaya karakter sekolah. Unsur-unsur tersebut dapat diamati pada sarana dan prasarana sekolah, proses belajar-mengajar di kelas, kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan nonkurikuler lain di komunitas. Penilai juga dapat melihat dokumen sekolah yang mendukung penilaian pada lembar observasi. Data observasi dan data-data administratif digabungkan untuk memberikan skor pada penilaian PPK. Data administrasi berupa dokumen-dokumen pendukung (tertulis dalam dokumen, atau dokumentasi dalam bentuk digital, seperti video, foto, dan lain-lain).

Kepala sekolah, komite sekolah, perwakilan komunitas, pengawas dan dinas pendidikan melakukan evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter dengan cara mengisi lembar penilaian diri *(self-assessment)* dengan mempergunakan Panduan Penilaian Keberhasilan PPK.

Aspek-aspek yang diukur dalam penilaian keberhasilan PPK adalah :

a. asesmen awal,
b. sosialisasi PPK kepada para pemangku kepentingan pendidikan,
c. visi, misi, dan perumusan,
d. desain kebijakan PPK,
e. desain program,
f. PPK berbasis kelas,
g. pengembangan budaya sekolah,
h. partisipasi masyarakat,
i. implementasi nilai-nilai utama, dan
j. evaluasi PPKh.

Panduan detail penilaian PPK bisa dilihat pada buku 3 yaitu Panduan Penilaian Keberhasilan Penguatan Pedidikan Karakter (PPK)

## B. Evaluasi Program

Evaluasi adalah kegiatan mandiri yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap program yang berkaitan dengan PPK. Evaluasi ini dilakukan oleh direktorat teknis yang mengadakan program PPK, Puslitjak dan PASKA sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing unit tersebut. Evaluasi dilakukan berdasarkan skema yang telah disetujui oleh tim PPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan kegiatan evaluasi adalah untuk mendapatkan data tentang taraf keberhasilan pelaksanaan gerakan PPK pada satu satuan target waktu yang telah ditetapkan, misalnya per tiga bulan dan enam bulan atau satu semester yang dilanjutkan secara berkesinambungan untuk waktu-waktu berikutnya. Dari kegiatan ini dapat diketahui seberapa berhasil tujuan dari PPK tercapai, seberapa efektif program yang dilakukan oleh Kemendikbud dan bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas program PPK ke depannya

Tujuan dari evaluasi program adalah :

1. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui efektivitas program Penguatan Pendidikan Karakter;
2. Mendapatkan gambaran tentang capaian dari tujuan Penguatan Pendidikan Karakter;

3. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Menilai keberhasilan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Menentukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter; dan
6. Mengidentifikasi *sustainability* program Penguatan Pendidikan Karakter.

Sasaran pelaksanaan evaluasi program PPK adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan gerakan PPK. Sedangkan sasaran evaluasi dari gerakan PPK disesuaikan dengan peserta atau target dari masing-masing jenis kegiatan program PPK.

Pelaksanaan evaluasi program gerakan PPK harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut.

**a. Berorientasi pada Proses**
Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemajuan yang dicapai. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk peningkatan mutu pelaksanan gerakan PPK di sekolah.

**b. Mengacu pada Kriteria Keberhasilan**
Evaluasi seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan disesuaikan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gerakan PPK.

**c. Mengacu pada Asas Manfaat**
Evaluasi sudah seharusnya dilaksanakan dengan tidak mencari-cari kesalahan akan tetapi justru mencari solusi yang dapat mempermudah pelaksanaan gerakan PPK di sekolah. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi harus berorientasi pada kegunaan dan manfaat yang bisa digunakan sekolah untuk mengelola pelaksanaan gerakan PPK di sekolah.

**d. Dilakukan secara Objektif**
Evaluasi harus dilaksanakan secara objektif sesuai dengan apa yang terjadi dan melaporkan hasil temuannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Evaluasi program PPK dilakukan melalui observasi (pengamatan langsung), analisis dokumen, survei, wawancara maupun diskusi data untuk mengumpulkan data, baik data-data administratif maupun catatan-catatan pendukung untuk menilai sebuah program atau kegiatan. Metode yang digunakan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh dan target dari evaluasi tersebut.

Observasi yang dilakukan meliputi observasi lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial sekolah, dan budaya karakter sekolah. Unsur-unsur tersebut dapat diamati pada sarana dan prasarana sekolah, proses belajar-mengajar di kelas, kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan nonkurikuler lain di komunitas. Penilai juga dapat melihat dokumen sekolah yang mendukung penilaian pada lembar observasi.

Selain observasi, analisis dokumen dapat juga dapat digunakan jika sumber data yang dimaksud dalam evaluasi adalah dokumen regulasi atau kebijakan. Metode lain yang bisa digunakan adalah mengadakan diskusi terpumpun dalam mengevaluasi efektivitas program dengan mengundang target peserta dari program tersebut.

Instrumen monitoring dan evaluasi PPK dipergunakan oleh Direktorat Teknis, Puslitjak atau PASKA dalam menilai keberhasilan keseluruhan program PPK. Instrumen dibuat sesuai dengan tujuan dari kegiatan program PPK. Instrumen ini juga dapat menjadi sarana bagi mengevaluasi, mengidentifikasi keberhasilan program, mengevaluasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mengembangkan dan memperbaiki rencana strategis program PPK di masa depan.

Beberapa dimensi penilaian yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Materi
   Materi adalah segala bahan, dokumen atau panduan yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan program atau kegiatan PPK.

2. Metode
   Metode adalah segala aktivitas dalam kegiatan atau program yang diadakan dalam menyebarluaskan kemampuan atau informasi mengenai Penguatan Pendidikan Karakter. Terdapat delapan kegiatan atau aktivitas yang teridentifikasi masuk ke dalam metode yaitu sosialisasi PPK, komunikasi PPK, *training of trainers* (TOT), pelatihan PPK

tingkat provinsi dan satuan pendidikan, pola pendampingan, literasi, penilaian PPK, dan sinkronisasi program antarunit di Kemendikbud.

3. Sumber daya Manusia
   Sumber daya manusia (SDM) adalah segala pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelenggaraan program PPK atau pelaksanaan PPK di lapangan. Terdapat empat aktor yang telah diidentifkasi berkontribusi terhadap pelaksana suksesnya program atau kegiatan PPK yaitu dukungan warga sekolah, orang tua, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

4. Kepemimpinan
   Kepemimpinan terfokus pada fungsi kepemimpinan sekolah yang di dalamnya terdapat kepala sekolah dan guru dalam menggerakkan PPK di sekolah. Indikator yang dimasukkan dalam aspek ini adalah :
   - sinkronisasi PPK dengan tata tertib sekolah/kelas,
   - infusi nilai PPK dalam Kurikulum (intra-,ko-, dan ekstra-),
   - infusi nilai PPK Dukungan Regulasi (tata tertib),
   - infusi nilai PPK dalam visi misi,
   - infusi nilai PPK dalam program,
   - infusi nilai PPK pada budaya sekolah, dan
   - sosialisasi, koordinasi dan integrasi program sekolah.

5. Sumber Dana
   Sumber dana merupakan aspek yang tidak kalah penting dari aspek lainnya. Ketersediaan sumber dana bisa dikatakan merupakan komitmen dalam menyelenggarakan PPK di segala tingkat. Terdapat tiga aspek yang teridentikasi dalam hal sumber dana, yaitu dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat.

6. Hasil
   Hasil merupakan ketercapaian tujuan dari pelaksanaan program penguatan karakter. Ada dua aspek yang masuk dalam komponen hasil yaitu perubahan positif perilaku peserta didik secara individual dan perubahan positif pada budaya sekolah di satuan pendidikan.

# REFERENSI

Albertus, Doni Koesoema. 2015. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius.

Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jogjakarta: Diva Press.

Effendy, Muhadjir. 2016. Arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam Pelatihan Pengembangan Kapasitas untuk Penguatan Pendidikan Karakter di Hotel Santika, Jakarta, 27 September 2016. (transkrip rekaman Kemdikbud).

Ki Hadjar Dewantara. 1962. *Bagian I Pendidikan*. Jogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.

UNESCO. 2015. *Rethinking Education: Towards a Global Common Good*?. Paris*:* UNESCO Publishing